



► PEMBUANGAN SAMPAH

Tuntutan Warga Dipenuhi, TPST Dibuka Lagi

Ujang Hasanudin & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

BANTUL—Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan kembali dibuka setelah sempat ditutup akibat diprotes warga sekitarnya.

Pembukaan TPST dilakukan setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY berjanji akan memenuhi tuntutan warga sekitar. TPST yang menutup akses masuk sejak beberapa hari terakhir. Penutupan TPST oleh warga sekitar, bukan kali pertama terjadi. Aksi warga ini sudah sering dilakukan sejak 2018 lalu.

Berdasarkan pantauan *Harian Jogja* di lokasi kejadian pada Rabu (23/12) siang, pintu masuk TPST Piyungan sudah dibuka kembali sejak pagi hari. Hilir mudik pengangkut sampah sudah lancar. Terdapat dua alat berat untuk meratakan sampah dari hasil bongkar armada di TPST.

Ada tujuh tuntutan warga, yakni, pembuatan dermaga sampah 200 meter masuk ke lokasi agar tidak mengganggu aktivitas warga; perbaikan drainase air limbah maupun air hujan; penerangan jalan dari pertama masuk pintu timbangan sampai pembuangan; penyempitan lalat dan pengecekan kesehatan berkala bagi warga sekitar TPST Piyungan; kebersihan jalan; pengurukan lahan yang sudah tidak aktif agar plastik tidak beterbangan ke rumah warga; serta dana kompensasi bagi setiap kepala keluarga.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Fauzan Umar, mengatakan aspirasi warga sekitar TPST Piyungan merupakan hal yang wajar dan harus dipenuhi karena bagian dari hak warga. Menurut dia, hampir sebagian besar aspirasi warga sudah dipenuhi, tetapi karena faktor alam, yakni musim hujan, sehingga persoalan yang terjadi di TPST Piyungan selalu terulang.

"Persoalan muncul di saat musim hujan karena alat enggak bisa bekerja maksimal, pengurukan tidak maksimal, drainase tersumbat sampah sehingga saat hujan deras luber (dan limbah) mengalir sampai pemukiman," kata Fauzan, saat menerima aspirasi warga sekitar TPST Piyungan di Kantor UPT TPST Piyungan, Rabu.

► Halaman II

Tuntutan Warga...

Selain itu, terkadang armada sampah juga tidak patuh. Sebenarnya, kata dia, armada pengangkut sampah yang boleh masuk adalah *dump truck* atau truk tertutup, tetapi saat ini semua armada pengangkut sampah masih bisa masuk karena mereka juga kebingungan mau membuang sampah ke mana.

Kemudian alat berat yang ada juga belum maksimal. Alat berat yang berfungsi saat ini hanya dua, yakni ekskavator dan bulldoser. Sementara dua alat berat lainnya masih diperbaiki dan proses perbaikan tidak selesai dalam waktu singkat. Butuh berhari-hari bahkan sampai satu bulan waktu perbaikan alat berat. "Pada 2021 baru ada pengadaan alat berat, tambah satu bulldoser dan satu ekskavator," ujar Fauzan.

Lebihi Kapasitas

Fauzan mengatakan kondisi TPST Piyungan sebenarnya sudah terjadi kelebihan daya tampung (*over load*) sejak 2016 lalu. Namun karena belum ada solusi lain sehingga TPST Piyungan mau tidak mau harus menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari tiga wilayah, Bantul, Sleman dan Jogja. Setiap harinya sampah yang dibuang ke TPST Piyungan sekitar 600 ton.

Mestinya, kata dia, sudah mencari lahan baru atau pelebaran, tetapi mencari lahan baru bukan persoalan mudah. Luas lahan TPST Piyungan yang ada saat ini sekitar 10 hektare untuk pembuangan sampah dan 2,5

hektare untuk kantor dan tempat untuk alat berat. Pemda DIY, kata Fauzan, tengah berupaya memperlebar enam hektare di timur TPST Piyungan, tetapi yang baru selesai pembebasan lahannya baru sekitar 1,9 hektare. Sisanya masih dalam proses negosiasi.

Sambil menunggu proses perluasan lahan, Pemda DIY juga sedang mengupayakan adanya kerja sama teknologi pengurai sampah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun teknologi pengurai sampah seperti apa masih dikaji. Berdasarkan catatan *Harian Jogja* upaya KPBU ini sudah diwacanakan sejak 2018 lalu tetapi sampai saat ini masih belum juga terealisasi. "Sekarang masih dalam tahap kajian. Pada 2025 semoga bisa operasi, setelah kajian kemudian dilelang. Investor bisa dari dalam atau luar negeri," ujar Fauzan.

Fauzan kembali menegaskan tuntutan warga hal yang wajar dan harus dipenuhi. Namun proses pemenuhan aspirasi tidak bisa langsung semua, melainkan secara bertahap. Khusus soal aspirasi kompensasi per kepala keluarga, Fauzan mengatakan bentuknya sudah dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan melalui pemerintah desa dan pemerintah desa bisa mengalokasikan bukan dalam bentuk uang tunai melainkan layanan, "Misalnya pengadaan air bersih, dan sebagainya," ungkap

Fauzan.

Kepala Dinas PUPESDM DIY, Hananto Hadi Purnomo, telah sepakat dengan Bappeda DIY untuk mengalokasikan anggaran optimalisasi TPST Piyungan khususnya untuk drainase. "Harus disurvei dulu, areanya berapa, panjangnya berapa, dimensinya berapa, baru tahu. Yang penting sepakat dulu. Kami pemda sepakat memfasilitasi masyarakat untuk membuat drainase," ujarnya.

Tuntutan Warga

Bambang Riyanto, salah satu perwakilan warga yang menyerahkan poin aspirasi mengucapkan terima kasih kepada Pemda DIY yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Fauzan akan mengawal janji Pemda DIY tersebut. Dia mengatakan warga sudah merelakan berdampingan dengan TPST Piyungan sehingga aspirasi warga seharusnya dipenuhi. "Aspirasi ini kami perjuangkan sekian tahun, kami ini menderita," ujar Bambang.

Juru Bicara Warga Sekitar TPST Piyungan, Maryono mengaku warga sudah sabar sejak dulu. "Pemerintah tidak pernah memperhatikan kondisi kami. Kami juga minta kompensasi, kalau tidak bisa dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk hewan ternak seperti kambing atau ayam," kata Maryono.

Menurut dia, kurang lebih 25 tahun warga bertahan dan berdampingan dengan sampah. Jadi sudah sewajarnya warga mendapat kompensasi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005